

**PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT DESA TOULIANG PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
UTARA 2015**

**(Suatu Studi di Desa Touliang Kakas Kecamatan Kakas Barat Kabupaten
Minahasa) ¹**

Oleh : Ira Indra Gerungan ²

ABSTRAK

Harus di akui penelitian perilaku pemilih, di Indonesia, masih bisa dikatakan relatif baru berkembang. Artinya, masih sedikit sekali data dan literatur yang bisa kita dapatkan guna dijadikan bahan analisa, untuk melihat dinamika perilaku pemilih. Setidaknya ada beberapa alasan yang menyebabkan kenapa studi tentang perilaku pemilih di Indonesia mendapatkan hambatan dalam pengembangannya. Diantaranya adalah, Pemilu dalam kurun waktu lama terutama masa Orba, tidak sungguh-sungguh menjadi tempat dimana pemilih mengekspresikan & menentukan pilihan, karena kebijakan fusi parpol, penerapan massa mengambang, pemberlakuan steril politik di kalangan pemilih desa, dan ada money politics untuk memilih Golkar, dan masih banyak hal-hal lain, telah membuat para peneliti untuk melakukan penelitian tentang perilaku pemilih, menjadi kurang tertarik. Karena keadaan pemilih pada waktu itu tidak menggambarkan situasi sebenarnya dari perilaku pemilih. Asumsinya, karena perilaku pemilih tidak bisa diteliti mengingat sedemikian besar suara yang diberikan pemilih tidak berdasar pilihan sungguh-sungguh.

Selain itu juga kenapa perilaku pemilih ini kurang menarik sebagai bahan untuk diteliti karena, absennya studi survei pendapat umum dalam kurun waktu lama, sebagai akibat dari kebijakan kontrol politik Orba terhadap berbagai kegiatan penelitian. Baru setelah tahun 1998, dengan tumbangnya Orba dan dihapusnya berbagai kebijakan represif, studi perilaku pemilih ini mulai mendapat perhatian. Ada banyak studi mengenai Pemilu di Indonesia, tetapi sebagian besar menyoroti aspek institusi atau proses Pemilu, seperti kajian mengenai partai politik, dinamika Pemilu, konflik di dalam parpol, konflik Pemilu dan sebagainya, namun jarang tentang perilaku pemilih.

Pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak diseluruh Indonesia yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 lalu, berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, masyarakat di Kecamatan Kakas Barat, Desa Touliang tidak semua memberikan hak pilih. Kenapa hal ini terjadi, menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai factor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu.

Kata Kunci : Perilaku Pemilih

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT Manado

PENDAHULUAN

Setelah runtuhnya orde baru telah terjadi perubahan yang mendasar dalam pemilihan umum. Dimana telah diterapkan system pemilihan langsung.

Hal yang cukup menarik berkaitan dengan perubahan mendasar pada sistem pemilihan umum ini adalah dinamika yang terjadi pada perilaku pemilih. Maraknya pemilu, baik itu menyangkut pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif baik itu DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan, membuat dinamika perilaku pemilih sangat menarik untuk diamati. Karena dengan terjadinya perubahan pada sistem pemilu, telah menjadikan suara pemilih menjadi salah satu faktor yang penting dalam menentukan siapa yang akan terpilih pada berbagai proses kontestasi pemilu tersebut. Dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya pemilih hanya menjadi salah satu indikator dari demokrasi prosedural. Sehingga dengan fenomena ini, yang cukup menarik juga untuk diteliti adalah, apakah dengan adanya perubahan yang mendasar dalam sistem pemilu ini berpengaruh cukup signifikan terhadap political engagement masyarakat. Dan apakah, perubahan mendasar tersebut cukup signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat atau justru sebaliknya. Walaupun untuk menjadikan partisipasi masyarakat sebagai alat ukur keberhasilan demokrasi masih cukup debatable. Fenomena ini cukup tergambar dari data hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia pada tahun 2009, dimana ditemukan ketertarikan masyarakat untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan politik ternyata sangat rendah, namun dibandingkan dengan data yang didapatkan apakah mereka akan turut serta dalam pemilu secara sadar dan berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, ternyata sangat tinggi. Data ini menggambarkan bahwa ternyata walaupun political engagement masyarakat rendah namun keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu cukup tinggi.³

Perilaku masyarakat yang seperti itu, serta faktor-faktor yang menyebabkan kenapa masyarakat bertindak seperti itu menjadi bahan studi yang cukup menarik untuk di teliti. Karena seperti yang sudah diungkapkan di atas, bahwa dengan terjadinya perubahan mendasar pada sistem pemilu, masyarakat menjadi titik sentral sebagai faktor penentu bagi partai ataupun kandidat, agar dapat memenangkan kontestasi pemilu yang dilakukan.

Harus di akui penelitian perilaku pemilih, di Indonesia, masih bisa dikatakan relatif baru berkembang. Artinya, masih sedikit sekali data dan literatur yang bisa kita dapatkan guna dijadikan bahan analisa, untuk melihat dinamika perilaku pemilih. Setidaknya ada beberapa alasan yang menyebabkan kenapa studi tentang perilaku pemilih di Indonesia mendapatkan hambatan dalam pengembangannya. Diantaranya adalah, Pemilu dalam kurun waktu lama terutama masa Orba, tidak sungguh-sungguh menjadi tempat dimana pemilih mengekspresikan & menentukan pilihan, karena kebijakan fusi parpol, penerapan

³ Lembaga Survey Indonesia, Survey Perilaku Pemilih Menuju Pemilu 2009, Konferensi Pers, Jakarta, Maret, 2009

massa mengambang, pemberlakuan steril politik di kalangan pemilih desa, dan ada money politics untuk memilih Golkar, dan masih banyak hal-hal lain, telah membuat para peneliti untuk melakukan penelitian tentang perilaku pemilih, menjadi kurang tertarik. Karena keadaan pemilih pada waktu itu tidak menggambarkan situasi sebenarnya dari perilaku pemilih. Asumsinya, karena perilaku pemilih tidak bisa diteliti mengingat sedemikian besar suara yang diberikan pemilih tidak berdasar pilihan sungguh-sungguh.

Selain itu juga kenapa perilaku pemilih ini kurang menarik sebagai bahan untuk diteliti karena, absennya studi survei pendapat umum dalam kurun waktu lama, sebagai akibat dari kebijakan kontrol politik Orba terhadap berbagai kegiatan penelitian. Baru setelah tahun 1998, dengan tumbanganya Orba dan dihapusnya berbagai kebijakan represif, studi perilaku pemilih ini mulai mendapat perhatian. Ada banyak studi mengenai Pemilu di Indonesia, tetapi sebagian besar menyoroiti aspek institusi atau proses Pemilu, seperti kajian mengenai partai politik, dinamika Pemilu, konflik di dalam parpol, konflik Pemilu dan sebagainya, namun jarang tentang perilaku pemilih.

Pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak diseluruh Indonesia yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 lalu, berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, masyarakat di Kecamatan Kakas Barat, Desa Touliang tidak semua memberikan hak pilih. Kenapa hal ini terjadi, menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai factor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu.

Dengan melihat uraian diatas, dengan mempertimbangkan sisi signifikansi dari perilaku pemilih, maka penulis tertarik untuk meneliti perilaku pemilih yang ada di **Desa Touliang Kakas Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2015 lalu**. Mengapa wilayah ini penulis anggap mempunyai signifikansi untuk dilakukan penelitian terhadap perilaku pemilihnya, karena, penulis melihat cukup terjadi dinamika pada perilaku pemilih di wilayah ini.

KERANGKA TEORI

Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik. Samuel P. Huntington (1990:16) berpendapat bahwa perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup “suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Menurut Mahendra (2005:75), perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu.

Sementara perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti (dalam Efriza 2012:480) adalah “Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.

Menurut Ramlan Surbakti (2010 : 46), perilaku memilih dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik social dan pengelompokan-pengelompokan social mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih. Pengelompokan social ini misalnya berdasarkan umur, jenis kelamin, agama, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Untuk itu pemahaman terhadap pengelompokan social baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi keagamaan, organisasi profesi dan sebagainya, maupun kelompok informal seperti keluarga , pertemanan atau kelompok-kelompok kecil lainnya. Hal ini merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam bentuk sikap persepsi dan orientasi seseorang. Jadi keanggotaan seseorang kepada kelompok-kelompok social tertentu dapat mempengaruhi seseorang di dalam menentukan pilihannya pada saat pemilu.
2. Pendekatan psikologis , adalah ilmu sifat dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari tingkah laku dan aktifitas masyarakat di pengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum sehingga ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan psikologis (Sulhardi: 2008). Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelas perilaku pemilih. Para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variable yang menentukan dalam perilaku politiknya.
3. Pendekatan Rasional , adalah menjelaskan bahwa kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan , tetapi juga perbedaan dari alternative berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah, jadi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih , terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih (Surbakti : 1992 : 50)

Jenis-Jenis Perilaku Pemilih

Menurut Firmanzah (2007:134), perilaku pemilih diklasifikasikan dalam empat jenis. Adapun empat jenis perilaku pemilih tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemilih Rasional

Dalam konfigurasi pertama terdapat pemilih rasional (*rational voter*), dimana pemilih memiliki orientasi tinggi pada *policy-problemsolving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Ciri khas pemilih jenis ini adalah tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor seperti faham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan dibandingkan faham dan nilai partai dan kontestan. Oleh karena itu, ketika sebuah partai politik atau calon kontestan ingin menarik perhatian pemilih dalam matriks ini, mereka harus mengedepankan solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya, hubungan luar negeri, pemerataan pendapatan, disintegrasi nasional, dan lain-lain. Pemilih tipe ini tidak akan segan-segan beralih dari sebuah partai atau seorang kontestan ke partai politik atau kontestan lain ketika mereka dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan.

b. Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah *rational voter* untuk berpaling ke partai lain. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. Pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik dan kandidat mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya, pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.

Pemilih jenis ini akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga kemungkinan akan muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai ideologi dengan *platform* partai yaitu memberikan kritik internal, frustrasi, dan membuat partai baru yang memiliki kemiripan karakteristik ideologi dengan partai lama. Kritik internal merupakan manifestasi ketidaksetujuan akan sebuah kebijakan partai politik atau seorang kontestan. Ketika pemilih merasa kritiknya tidak difasilitasi oleh mekanisme internal partai politik, mereka cenderung menyuarakannya melalui mekanisme eksternal partai, umpamanya melalui media massa seperti televisi, radio, dan sebagainya. Frustrasi merupakan posisi yang sulit bagi pemilih jenis ini. Di satu sisi, mereka merasa bahwa ideologi suatu partai atau seorang kontestan adalah yang paling sesuai dengan karakter mereka, tapi di sisi lain mereka merasakan adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan yang akan dilakukan partai atau kandidat

tersebut. Biasanya pemilih ini akan melihat-lihat dahulu (*wait and see*) sebelum munculnya ide kemungkinan yang ketiga, yaitu membentuk partai baru. Pembuatan partai biasanya harus dipelopori oleh tokoh-tokoh yang tidak puas atas kebijakan suatu partai. Mereka memiliki kemampuan untuk menggalang massa, ide, konsep, dan reputasi untuk membuat partai tandingan dengan nilai ideologi yang biasanya tidak berbeda jauh dengan partai sebelumnya.

c. Pemilih Tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budayanya, nilai, asal-usul, faham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih suatu partai politik. Kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, serta pembangunan dianggap sebagai parameter kedua. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta faham yang dianut.

Partisipasi Politik

Secara etimologi Partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *pars* yang berarti bagian dan *capere* yang berarti mengambil. Bila digabungkan maka dapat kita artikan “ mengambil “. Dalam bahasa inggris *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi partisipasi politik dapat diartikan sebagai sebagai suatu tindakan untuk mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Soeharno: 2004; 102).

Partisipasi politik ialah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin Negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) Miriam budiardjo (2010:367).

Demikian juga dengan Herbert McClosky, “Political participation” (1972:252) Partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Huntington dan Nelson (1977:3) memandang partisipasi politik sebagai suatu kegiatan warga Negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Verba dan Nie (1972 : 20) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara untuk mempengaruhi pilihan orang-orang untuk posisi-posisi pemerintahan dan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah (barnes et al., 1979; verba, schlozman and Brady, 1995; Conway, 2000) bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi.

Tommi legowo (2006 : 30) mengatakan partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga Negara yang secara sengaja maupun dengan tidak sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan sistem politik atau pemerintahan.

Sedangkan Mubyarto (1995 : 34) mengatakan bahwa partisipasi politik sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Sementara Canter (dalam arimbi, 1993:17) menyatakan partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat dipihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Lebih lanjut dikatakan partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan memengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan akan tanggung jawab dan kesadaran mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

Dusseldorp (1981 : 67) mengartikan partisipasi sebagai kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal.

Definisi lebih rinci dikemukakan oleh Cohen Uphoff (1979 : 54), partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program. Sementara itu

Davis (dalam Basrowi, Sudikin dan Suko Susilo, 2012: 65)., memberikan definisi partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong dirinya untuk memberi sumbangan bagi tercapainya tujuan dan membagi tanggung jawab diantara mereka.

Fungsi Dan Tugas Partisipasi Politik

Menurut Robert Lane (dalam Rush et al., 2000 : 20) partisipasi politik memiliki empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu;

1. Fungsi *pertama* sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
2. Fungsi *kedua* sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
3. Fungsi *ketiga* sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana

bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik. Terlebih lagi bagi seseorang yang terjun dalam bidang politik, seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.

4. Fungsi *keempat* sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Menurut Arbi Sanit (1985 : 42) ada tiga fungsi partisipasi politik yaitu;

1. *Pertama* memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya. Partisipasi politik ini sering terwujud dalam bentuk pengiriman wakil-wakil atau utusan pendukung ke pusat pemerintahan, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik yang telah dibina dan dilembagakan oleh penguasa tersebut.
2. *Kedua* partisipasi yang dimaksudkan sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah. Langkah itu dilakukan dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki atau mengubah kelemahan tersebut. Partisipasi ini dapat terlihat dalam bentuk membuat petisi, resolusi, aksi pemogokan, demonstrasi, dan aksi protes.
3. *Ketiga* partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. Untuk mencapai tujuan seperti itu seringkali dilakukan pemogokan, pembangkangan politik, huru-hara dan kudeta bersenjata.

Selain memiliki berbagai fungsi, partisipasi politik juga memiliki beberapa tugas yaitu;

1. Untuk mendorong program-program pemerintah, hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintahan.
2. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan,
3. Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Untuk menyampaikan nilai-nilai, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan keyakinan-keyakinan politik diperlukan sarana-sarana. Untuk itu selanjutnya Almond menyebutkan adanya enam sarana (agen sosialisasi politik) yaitu keluarga, sekolah, kelompok bergaul atau bermain, pekerjaan, media massa dan kontak-kontak politik langsung.

Pemilihan Umum

Menurut Ramlan (1992:181) pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Selain itu, Ali moertopo (1974 : 30) mengemukakan bahwa pada hakekatnya pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang mendasar dalam pembukaan UUD 1945.

Sedangkan paimin napitupulu (2004 : 65) mendefinisikan pemilu sebagai suatu mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga Negara dalam proses memilih sebagian rakyat pemimpin pemerintah.

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash, serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (representative goverment). Pemilihan umum juga disebut dengan arena "political market" yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak social dengan para peserta pemilu.

Pratikno juga menyatakan bahwa pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat (votes) menjadi wakil rakyat (seats). Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga Negara. Sebagai instrument yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka.

Wakil rakyat yang dihasilkan dari pemilu diharapkan mampu untuk merepresentasikan suara rakyat. Selain untuk menghasilkan pemerintahan yang representative dan bertanggung jawab, pemilu juga digunakan sebagai parameter penting dari proses transisi menuju konsolidasi demokrasi.

Pilkada

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang di laksanakan secara demokratis sebagaimana di amanatkan dalam pasal 18 ayat 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib di hormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur.

Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung.

Menurut Rozali Abdullah (2005 : 23), beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam perspektif ilmu sosial dasar, adalah:

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat Warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karenanya, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung.
2. Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi yang dimiliki DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah dengan DPRD Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) UU No.22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan menurut pasal 32 ayat 2 jo pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 1999, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan mitra sejajar dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya harus sama-sama dipilih oleh rakyat
4. Sering terdengar isu politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Masalah politik uang ini terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, apabila

dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung kemungkinan terjadinya politik uang bias dicegah atau setidaknya dikurangi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian-penelitian yang dimaksud adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh obyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah (Lexy Moleong 2007:6)

Alasan penulisan melakukan penelitian terhadap obyek sebagaimana dalam rumusan masalah untuk memahami secara mendalam fenomena, bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara. Penelitian ini tidak termasuk membuat generalisasi ataupun digunakan untuk memahami kasus lain. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data baik itu data primer maupun data sekunder diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian ini. Hal yang akan diteliti dengan metode ini adalah keadaan partisipasi politik pada saat penelitian. Metode ini digunakan karena masyarakat desa Touliang Kakas, kecamatan Kakas Barat Minahasa masih sulit dipahami hanya dengan sekali kunjungan saja sehingga dibutuhkan metode ini untuk memahami masalah dan memperoleh data yang valid dan real.

2. Wawancara

Wawancara ialah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk menjawab secara lisan. Untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti terlebih dahulu membuat pertanyaan-pertanyaan pokok wawancara yang dilakukan wawancara terbuka artinya wawancara dilakukan ketika pewawancara dan informan sama-sama mengetahui permasalahan yang akan dibahas dalam wawancara tersebut. Metode ini dilakukan dengan tanya jawab langsung secara lisan kepada informan untuk mengungkap berbagai data dan informasi sesuai dengan pertanyaan penelitian.

3. Studi pustaka atau studi documenter

Studi pustaka atau studi documenter dilakukan dipergustakaan dengan cara membaca buku-buku rujukan atau referensi, perundang-undangan, dokumen pemerintah serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga yang akan dikumpulkan merupakan data sekunder dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Kabupaten Minahasa.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (PILGUB) tahun 2015 lalu di Desa Touliang Kecamatan Kakas Barat dilakukan serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Pemilihan secara serentak ini baru pertama kali dilakukan sejak bergulirnya era reformasi. Saat itu yang menjadi peserta pada Pilkada yang dalam hal ini adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu :

1. Pasangan Olly Dondokambey, SE dan Drs. Steven O.E Kadow.
2. Pasangan Maya Rumantir dan Glenny Kairupan.
3. Pasangan Dr. Benny Jozua Mamoto, SH., M.Si dan David Bobihoe Akib.

Dari hasil *real count* yang dipublikasikan oleh KPUD Kabupaten Minahasa, pasangan Olly Dondokambey dan Steven Kadow khususnya di wilayah Minahasa jauh mengungguli pasangan lainnya yaitu dengan memperoleh suara diatas 50 % bahkan mencapai 64,80 % yaitu 112.269 suara (data KPUD Minahasa, tahun 2015), dari total pemilih kabupaten Minahasa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih mereka.

Sementara perolehan suara kandidat yang saat itu menjadi lawan mereka seperti pasangan Maya Rumantir dan Glenny Kairupan hanya memperoleh 16,24% yaitu 28.136 suara, sedangkan pasangan lainnya yaitu Benny Mamoto dan David Bobihoe Akib memperoleh 18,97% yaitu 32.860 suara.

2. Perilaku Memilih Masyarakat Touliang Kakas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015

Pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) desa Touliang Kakas, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa adalah berjumlah 1.243 pemilih yang terdiri dari 630 pemilih laki-laki, dan 613 pemilih perempuan. Dari jumlah pemilih tersebut yang menggunakan hak pilihnya disaat hari pemilihan berjumlah 1.207 pemilih yang terdiri dari laki-laki berjumlah 610 orang dan 597 pemilih perempuan. Sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 33 pemilih yang terdiri dari 18 orang pemilih laki-laki dan 15 pemilih perempuan.

Untuk melihat perilaku memilih masyarakat Desa Touliang Kakas, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, penulis akan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Firmanzah (2008), mengenai jenis-jenis perilaku pemilih.

1. Kategori Pemilih Rasional. (*Rational Voter*)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemilih jenis ini dikatakan sebagai pemilih yang memiliki orientasi tinggi pada *policy-problem solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Selain itu pemilih jenis ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kandidat dalam program kerja yang ditawarkan. Dan juga salah satu ciri khas pemilih jenis ini adalah tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kandidat.

Faktor seperti faham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, dan agama memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kandidat dibandingkan faham dan nilai partai dan kontestan. Oleh karena itu, ketika sebuah partai politik atau kandidat ingin menarik perhatian pemilih, mereka harus mengedepankan solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya, hubungan luar negeri, pemerataan pendapatan, disintegrasi nasional, dan lain-lain.

Pemilih tipe ini tidak akan segan-segan beralih dari sebuah partai atau kandidat ke partai politik atau kandidat lain ketika mereka dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan.

Jenis pemilih seperti ini terdapat juga pada masyarakat pemilih di Desa Touliang Kakas, Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa. Hal itu ditemukan penulis ketika mewawancarai beberapa informan mengenai alasan mereka dalam memilih kandidat tertentu pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 lalu. Karena sebagian besar dari mereka memperhitungkan apa keuntungan bagi diri mereka jika memilih kandidat yang mereka sukai.

Menurut penulis hal itu dimungkinkan karena tingkat pendidikan para informan terlihat sudah cukup baik. Disamping itu pengalaman mereka dalam hal pemilihan umum sudah banyak sehingga dalam membuat keputusan sudah melakukan berbagai pertimbangan rasional.

Terkait dengan figure dari kandidat yang saat itu menjadi peserta yaitu pasangan Olly Dondokambey dengan Steven Kandow dianggap oleh para informan dilihat dari program yang mereka tawarkan, merupakan pasangan yang paling mampu memenuhi kebutuhan mereka jika terpilih. Karena program-program dan apa yang sudah dilakukan oleh para calon ini dirasa oleh para informan merupakan program yang merupakan kebutuhan mereka.

Terkait dengan factor identitas terlebih asal-usul, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memang tidak menjadi masalah bagi mereka menurut para informan, karena keseluruhan kandidat memang asli berasal dari Sulawesi Utara.

Dengan hasil ini maka penulis dapat simpulkan pada masyarakat di Desa Touliang Kakas, Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa ada sebagian masyarakat pemilih yang terkategori pemilih yang rasional.

2. Kategori Pemilih Kritis

Seperti yang dijelaskan oleh Firmanzah (2008), pemilih kritis merupakan perpaduan antara tingginya orientasi atau harapan pada kemampuan partai politik atau seorang kandidat dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis.

Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah *rational voter* untuk berpaling ke partai lain.

Lebih lanjut dikatakan bahwa proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. Pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik dan kandidat mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan

yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya, pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatar belakangi pembuatan sebuah kebijakan.

Selain itu pemilih jenis ini katanya akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga kemungkinan akan muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai ideologi dengan *platform* partai yaitu memberikan kritik internal, frustrasi, dan membuat partai baru yang memiliki kemiripan karakteristik ideologi dengan partai lama.

Kritik internal merupakan manifestasi ketidaksetujuan akan sebuah kebijakan partai politik atau seorang kandidat. Ketika pemilih merasa kritiknya tidak difasilitasi oleh mekanisme internal partai politik, mereka cenderung menyuarakannya melalui mekanisme eksternal partai, umpamanya melalui media massa seperti televisi, radio, dan sebagainya. Frustrasi merupakan posisi yang sulit bagi pemilih jenis ini. Di satu sisi, mereka merasa bahwa ideologi suatu partai atau kandidat adalah yang paling sesuai dengan karakter mereka, tapi di sisi lain mereka merasakan adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan yang akan dilakukan partai atau kandidat tersebut. Biasanya pemilih ini akan melihat-lihat dahulu (*wait and see*) sebelum munculnya ide kemungkinan yang ketiga, yaitu membentuk partai baru.

Pemilih yang masuk dalam kategori jenis ini tidak dijumpai pada masyarakat pemilih di Desa Touliang Kakas. Karena kecenderungan untuk mengkritisi pasangan kandidat yang mereka idolakan atau akan mereka pilih tidak terjadi. Mereka percaya sepenuhnya dengan kandidat yang mereka idolakan.

Memang dari penjelasan beberapa informan, ada yang mendasari pilihan mereka pada partai tertentu karena pertimbangan ideologi, namun tidak sampai pada tahap mengkritisi program yang ditawarkan kandidat. Padahal beberapa informan mengaku kandidat idola mereka juga memiliki kekurangan dari sisi program yang akan dilakukan. Selain itu juga ada beberapa informan yang mengaku bahwa saat itu mereka ada juga rasa tidak percaya terhadap janji kandidat yang akan mereka pilih saat itu, namun mereka tidak tahu mau berbuat apa.

Selain itu dari beberapa keterangan yang diberikan oleh para informan penulis dapat menyimpulkan kondite partai politik saat ini, dimana telah menciptakan rasa tidak / kurang percayanya masyarakat, menjadi salah satu alasan sehingga membuat kurangnya masyarakat pemilih yang mempunyai keterikatan ideologi yang kuat dengan partai politik.

3. Kategori Pemilih Tradisional

Seperti yang dijelaskan oleh Firmanzah (2008), jenis pemilih kategori ini memiliki orientasi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budayanya, nilai, asal-usul, faham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih suatu partai politik.

Kebijakan seperti ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, serta pembangunan dianggap sebagai parameter kedua. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta faham yang dianut.

Kategori pemilih jenis ini walau jumlahnya sedikit namun masih ada di Desa Touliang Kakas. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jenis pemilih kategori ini sulit ditemukan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 lalu karena kandidat yang menjadi peserta semuanya merupakan putra asli daerah. Selain itu juga factor agama semua yang menjadi kandidat Gubernur adalah beragama Kristen walaupun yang menjadi pasangan mereka ada juga yang beragama muslim.

Terkait dengan figure seluruh informan mengaku tidak terlalu kenal secara mendalam dengan keseluruhan kandidat. Mereka hanya tahu dari pemberitaan media massa. Oleh sebab itu pemilih yang terkategori dalam jenis ini sangat sulit ditemui pada masyarakat pemilih di Desa Touliang Kakas, karena persyaratan ketegori pemilih jenis ini tidak terpenuhi.

3. Perilaku Pemilih yang tidak Memilih

Pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 lalu di Desa Touliang Kakas, ada juga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. dari hasil wawancara dengan beberapa informan diperoleh data bahwa hal itu disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya :

1. Faktor Internal.

Dari factor internal yang menjadi penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilih diantaranya karena adanya faktor teknis, dimana saat pemilihan, pemilih tersebut sedang tidak sehat atau memang memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Selain itu akibat faktor pekerjaan. Karena beberapa warga masyarakat Desa Touliang Kakas ada yang bekerja diluar daerah. Dan saat pemilihan dilaksanakan kantor dimana tempat mereka bekerja tidak libur.

2. Faktor Eksternal.

Dari factor eksternal yang menjadi penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilih karena adanya faktor administratif. Penyebabnya salah satu diantaranya adalah karena tidak terdata sebagai pemilih, tidak memiliki KTP/hilang.

Factor lain yang juga menjadi penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya adalah faktor sosialisasi, dimana beberapa informan mengaku factor sosialisasi pemilihan yang tidak terselenggara dengan baik, menjadi penyebab ada beberapa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Ada juga faktor lain seperti faktor politik. Faktor ini juga merupakan salah satu penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, karena adanya ketidakpercayaan terhadap partai, ada juga informan yang mengaku tak punya pilihan

atau kandidat, sehingga ada masyarakat yang mempunyai hak memilih namun tidak menggunakannya.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Desa Touliang Kakas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015

a. Faktor Pemerintah

Peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang signifikan kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat diantaranya adalah siapa saja yang dikategorikan sebagai pemilih. Ketentuan bahwa yang menjadi pemilih adalah masyarakat yang memiliki KTP atau memiliki NIK saja, jelas sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagai akibat kelalaian pelayanan publik pihak pemerintah.

Di kabupaten Minahasa pada saat PILGUB tahun 2015 lalu permasalahan ini juga diakui oleh penyelenggara baik KPUD maupun Panwasda kabupaten Minahasa. Dalam menjalankan tugas seringkali mereka terbentur dengan permasalahan perundangan yang berlaku.

b. Faktor Penyelenggara Pemilu

Lemahnya sistem perundangan kepemiluan jelas akan berdampak bagi para penyelenggara baik itu KPU maupun dari sisi pengawasannya yang dalam hal merupakan tugas dari PANWAS. Tidak jarang KPU dan PANWAS di daerah kehilangan kepercayaan diri dalam menjalankan fungsinya sebagai akibat lemahnya aturan yang dibuat.

Kurangnya atau lemahnya sosialisasi yang dilakukan, yang disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki, independensi para penyelenggara sangat sulit diciptakan sebagai salah satu akibat dari peraturan yang ada. Seperti yang diketahui sesuai peraturan perundangan yang berlaku pihak penyelenggara masih sering diganggu dengan pencairan anggaran yang padahal sangat berpengaruh pada pelaksanaan tahapan. Maka tidaklah mengherankan sering terjadi *bargaining* antara penyelenggara dengan pihak Pemda sebagai pemilik otoritas pendanaan. Dan hal ini sangat rawan terjadinya kongkalikong antara mereka, dan independensi di pertaruhkan.

Sementara dari pihak PANWAS lemahnya SDM, infrastruktur yang dimiliki ditambah dengan lemahnya aturan yang dibuat terkait fungsi dan kewenangan mereka membuat PANWAS sangat sulit menjalankan fungsinya secara optimal. Aturan yang ada saat ini hanya memberikan kewenangan bagi panwas hanya sebagai pemberi rekomendasi tanpa hak eksekusi penindakan menjadi problem serius.

c. Faktor Partai Politik

Keberadaan partai politik dalam sebuah negara demokrasi merupakan syarat mutlak. Keberadaan partai politik merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya demokrasi. Ironisnya keberadaan partai politik di Indonesia saat ini

menjadi faktor penyebab rapuhnya sistem demokrasi yang kita anut. Hal itu disebabkan karena partai politik belum dapat menjalankan fungsi seharusnya dengan baik.

Sebagai contoh, salah satu fungsi partai politik yang erat kaitannya dengan perilaku memilih masyarakat yaitu fungsi pendidikan politik. Fakta menunjukkan partai politik sangat lemah dalam menjalankan fungsi ini. Bahkan yang terjadi saat ini tingkah laku partai politik telah mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi kedalam jurang apatisisme yang dalam. Belum lagi fungsi rekrutmen hal ini menjadi momok bagi masyarakat jika melihat bagaimana partai politik menjalankan fungsi ini. Hal ini tidak saja menjadi permasalahan bagi masyarakat yang melihat akan tetapi juga menjadi masalah intern partai politik itu sendiri. Terjadinya kecemburuan antar sesama anggota dalam sebuah partai politik menjadi sebuah pemandangan yang lumrah. Hal itu disebabkan karena terkadang bahkan bisa dikatakan sering, demi pertimbangan pendanaan partai, fungsi rekrutmen ini sering dikorbankan. Banyak fakta yang menunjukkan dalam sebuah pencalonan partai politik akan mengusung figur yang memiliki dana walaupun figur itu tidak pernah atau belum pernah menjadi anggota dari partai politik itu. Sementara banyak kader yang sudah lama menjadi anggota dan memiliki kapabilitas yang lebih baik namun tidak memiliki dana akhirnya tidak dicalonkan.

Pembenahan partai politik saat ini sudah menjadi syarat mutlak jika kita menginginkan sistem demokrasi kita bisa menjadi baik. Karena menurut undang-undang 1945 yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Walaupun sebagai dampak dari eforia reformasi dan akibat kekecewaan terhadap keberadaan partai politik yang berkembang di tengah masyarakat, telah memunculkan kemungkinan peserta pemilu perseorangan (non partai).

Bahkan saat ini ada wacana yang mengemuka tentang rencana pengaturan mekanisme dan persyaratan pencalonan yang wajib diikuti oleh partai politik dalam sebuah pemilu. Walau terasa sulit namun hal itu perlu dicoba.

d. Terbentuknya Antusiasme

Momentum politik Pilgub Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa tahun 2015 menunjukkan angka partisipasi yang cukup tinggi yaitu hingga mencapai 89%, hal ini dapat dilihat pada jumlah pemilih yang menggunakan hak politiknya. Sementara untuk desa Touliang Kakas yang merupakan salah satu wilayah yang ada di kabupaten Minahasa, pemilih yang menggunakan hak pilihnya bahkan lebih dari 95 % . Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan dari terbentuknya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya, dengan pertimbangan bahwa calon yang hadir dalam pentas Pilgub cukup memiliki kapasitas dalam mewujudkan harapan mereka.

Melihat kandidat yang saat itu ikut bertarung didalam Pilgub adalah figur-figur yang dianggap memiliki kapasitas adalah sebuah alasan yang sebenarnya rasional dan kritis. Hal ini dapat dikatakan demikian apabila ditinjau dari alasan masyarakat kenapa menganggap calon yang hadir cukup memenuhi kapasitas dalam memenuhi keinginan masyarakat.

e. Peran Media Massa

Pada saat Pilgub di Kabupaten Minahasa berlangsung media telah dapat dikatakan cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sebagai akibat dari agitasi media terhadap Pilgub Sulut tahun 2015. Pemberitaan yang dilakukan secara terus menerus bahkan penyediaan kolom dan rubric khusus untuk sosialisasi tentang Pilgub tahun 2015 maupun sarana kampanye bagi para kandidat saat itu merupakan salah satu indikator peran media dalam mensukseskan Pilgub Sulawesi Utara tahun 2015, di Kabupaten Minahasa.

f. Peran Kandidat

Factor yang juga sangat berpengaruh perilaku memilih pada Pilgub Sulawesi Utara di kabupaten Minahasa adalah strategi yang dijalankan oleh sebagian besar dari para kandidat yang bersaing kala itu. Strategi money politik telah berhasil mendongkrak tingkat partisipasi politik saat itu. Hal itu mendapat dukungan dari tingkat pragmatisme politik masyarakat kabupaten Minahasa yang dikenal sangat tinggi.

g. Faktor Sosial Budaya

Pragmatisme yang ada dalam masyarakat dapat dibuktikan pada setiap pelaksanaan pemilu, dimana *money politics* selalu saja marak pada setiap pelaksanaan pemilu. Hal itu dilakukan dengan sadar oleh para kandidat yang bersaing dalam pemilu, karena strategi tersebut terbukti sangat manjur dalam melakukan penjangkaran dukungan masyarakat pemilih.

Di kabupaten Minahasa, khususnya di Desa Touliang Kakas permasalahan ini juga diakui oleh beberapa informan bahwa fenomena politik uang saat Pilgub Sulawesi Utara tahun 2015 lalu cukup tinggi. Mereka mengaku hampir semua kandidat yang bertarung melakukan strategi tersebut. Besaran uang yang diberikan juga cukup bervariasi. Dan itu dilakukan oleh para kandidat sendiri atau tim sukses mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arimbi, Mas Achmad. 1993. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Arbi, S. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ali Moertopo. 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Barnes, Samuel H., Max Kaase, and Klaus R. Allerbeck. 1979. *Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies*. Beverly Hill, California: Sage.
- Basrowi, Sudikin dan Suko Susilo. 2012. *Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Conway, M. M. 2000. Political Participation In The United State. USA: Congressional Quaterly Inc.
Cohen dan Uphoff, 1977, *Rural Development Participation : Concepts and Measures For Project Design, Implementation and Evaluation*, Ithaca New York : Cornell University.
- Davis, Keith,. 1967, *Human Relations at Work, the Dynamics of Organizational Behavior*, New York : Mc Graw Hill, Book Company.
- Dusseldrop, D.B.W.M. 1981. Participation In Planned Development Inluced By Goverments Of Developing Countries Local Level In Rial Areas. Wageningen University. Wageningen.
- Efriza, (2012). *Political Explore*. Bandung: Alfabeta
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Huntington, S.P & Nelson, J.M. 1977. *No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries*. Cambridge : Harvard University Press.
- Jack C. Plano, Robert E. Ringgs, Helenan S. Robin. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Rajawali Press. Jakarta.
- Kristiadi, J.1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Legowo, Tommi A., 2006. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Politik No 20.
- Mahendra, Oka. 2005. *Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal*. Millenium Publisher. Jakarta.
- Mubyarto, T. 1995. Politik Pembangunan. Yogyakarta. PT Tiara Wacana Yogya.
- Milbrath, Lester, and Goel, ML. 1997. Political Participation. Chicago : Rand McNally College Publishing Co.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : remaja Rosda Karya.
- McClosky. Herbert, 1972. Political Participation. International Encyclopedia of the Social Science. New York : The Macmillan Company.
- Nelson, Samuel P. Huntington dan Joan, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Paimin Napitupulu. 2004. Peran dan Pertanggung jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta. Desertasi Alumni. Bandung.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2000. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Partisipasi Politik*. IKIP Semarang Press. Semarang.
- Soeharno, 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. DIKTAT.
- Surbakti. Ramlan, 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.
- Verba. S dan Norman H.Nie. 1972. Participation in America. New York: Harper and Row.
- Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, and Henry E. Brady. 1995. Voice and Equality, Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge: Harvard University Press.

